RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Singorojo telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2026 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja mulai dari konsep dan rancangan awal hingga penetapan**.**

Perubahan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 dan Renstra Kecamatan Singorojo Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat hasil evaluasi, permasalahan dan isu penting, serta penyesuaian rencana kerja dan pendanaan untuk mencapai target kinerja Tahun 2026. Selanjutnya, dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo serta dasar pengendalian, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2026 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Singorojo pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kendal, 08 September 2026.
CAMAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah 29
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 37

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 38

3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2026 38
3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya disertai dengan Lampiran Rancangan Perubahan RKPD 2026 38

BAB IV Penutup 68

5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 69

5.2 Rencana Tindak Lanjut 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026Kabupaten Kendal 19

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal 28

Tabel 2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal 29

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kendal 37

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal 38

Tabel 3.2 Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Renja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026. Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026. Hal tersebut dikarenakan adanya capaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu ditambah anggarannya serta pengurangan anggaran / rasionalisasi anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Selanjutnya, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara top down dan bottom up, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Singorojo.

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah yaitu : Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2026 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
    a. Perubahan rincian belanja pada Penetapan dengan DPA 2026. Dalam perubahan APBD 2026 hal tersebut dapat diidentifikasi sehingga perlu diusulkan perubahan.
    b. Perlu adanya pergeseran beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    a. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran lebih tahun anggaran tahun berjalan;
    b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
    3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
    4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
    5. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II , mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan, perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, serta perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan.

Tujuan

a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2026;
b. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2026;
c. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2026
d. Menyesuaikan target, program, kegiatan, dan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan aktual.
e. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
f. Menjamin keselarasan perencanaan dengan perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

c. Realisasi keuangan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan tentang realisasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penjelasan terkait dengan:

Program, Kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya disertai dengan Lampiran Rancangan Perubahan RKPD 2026.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian Penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Singorojo sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II untuk Desa mandiri belum ada karena desa diwilayah Kecamatan Singorojo statusnya berkembang dan maju, nilai SAKIP dari target 73,25 realisasi 73,35 (101,14 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 96,41 realisasi 95,73 (99,29 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Singorojo sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Singorojo. Desa yang naik Statusnya ada 4 Desa dari tahun 2024 dan 2025, target tahun 2026 adalah 3 desa, karena belum ada pengisian IDM sampai dengan Triwulan II, maka belum diketahui berapa jumlah desa yang naik status di tahun 2026.

Berdasarkan formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo dari aplikasi Si-Eva bahwa Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 14,94 % (rendah), Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 12,95 % (rendah).Anggaran Penetapan Tahun 2026 Kecamatan Singorojo sebesar Rp 3.682.613.194,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.628.012.040,00 realisasi fisik sebesar 44,2 % (rendah).

Rendahnya realisasi keuangan Kecamatan Singorojo Tahun 2026 disebabkan karena pelaksanaan beberapa kegiatan belum sesuai jadwal, sebagian kegiatan dijadwalkan pada semester II, proses administrasi dan pertanggungjawaban belum seluruhnya selesai, serta adanya penyesuaian jadwal/kebijakan dan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini berdampak pada Realisasi keuangan masih di bawah target dan berpotensi terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada semester II.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kecamatan Singorojo melakukan langkah percepatan melalui monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, penyusunan rencana percepatan penyerapan, percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban, serta koordinasi intensif dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait.

Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing-masing program ,kegiatan,dan sub kegiatan pada Kecamatan Singorojo dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.516.708.714,00 realisasi sebesar Rp. 1.521.091.918,00 realisasi fisik sebesar 43,25 % dengan rincian sebagai berikut :
    1.1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 475.000,00 realisasi anggaran Rp. 55.000,00 realisasi fisik sebesar 11,58 % (rendah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
        1.1.1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 350.000,00 realisasi Rp. 35.000,00 realisasi fisik 10 %, hal ini karena proses penyusunan dokumen perencanaan masih dalam

proses penyusunan baik Renja Tahun 2027 maupun Perubahan Renja Tahun 2026.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 125.000,00 realisasi Rp. 20.000,00 realisasi fisik 16 %, hal ini karena belum waktunya penyusunan laporan capaian kinerja penyusunan LKJIP dan LKPJ tahun 2026.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.108.760.194,00 relisasi sebesar Rp 1.363.276.912,00 realisasi fisik sebesar 43,85 % (rendah), yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.108.635.194,00 relisasi sebesar Rp. 1.363.251.912,00 realisasi fisik 43,85 %, capaian masih rendah dikarenakan realisasi anggaran mengikuti jadwal pembayaran gaji dan tunjangan secara bulanan, serta adanya penyesuaian dan pemutakhiran data kepegawaian, komponen tunjangan, dan administrasi penggajian, ada 1 (satu) PNS yang meninggal dunia sehingga kekosongan pejabat struktural bertambah menjadi 3 (tiga) jabatan , namun sudah dianggarkan.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 125.000,00 relisasi sebesar Rp. 25.000,00 realisasi fisik 20 %, capaian masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketepatan waktu pengumpulan data dan dokumen transaksi keuangan, proses verifikasi dan rekonsiliasi yang membutuhkan waktu, masih adanya dokumen pertanggungjawaban yang perlu dilengkapi, serta koordinasi antar pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang belum optimal, sehingga berdampak terhadap penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan periodik belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 237.149.520,00 realisasi sebesar Rp. 136.774.098,00 realisasi fisik 57,67 % (tinggi), yang terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.255.500,00 realisasi sebesar Rp. 6.482.400,00 realisasi fisik 89,34 % (tinggi), capaian sudah tinggi karena perencanaan kebutuhan yang telah sesuai dengan kondisi riil, ketersediaan anggaran yang memadai, proses pengadaan yang berjalan lancar dan tepat waktu, serta koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang efektif. Kondisi tersebut mendukung terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.141.250,00 realisasi Rp. 16.601.438,00 realisasi fisik 66,03 % (tinggi), hal ini karena perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan riil, dukungan anggaran yang memadai, proses pengadaan yang berjalan lancar dan tepat waktu, serta koordinasi dan monitoring yang efektif. Kondisi tersebut mendukung terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.233.000,00 realisasi sebesar Rp. 0 realisasi fisik 0 % (rendah), karena pelaksanaan pengadaan peralatan rumah tangga belum dilaksanakan sampai dengan periode evaluasi Triwulan

II Tahun 2026 dan direncanakan untuk direalisasikan pada periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.043.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.461.000,00 realisasi fisik 36,14 % (rendah), karena pengadaan yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan riil, masih tersedianya sebagian stok logistik, serta adanya proses administrasi pengadaan dan pertanggungjawaban yang memerlukan waktu

1.3.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 23.235.000,00 realisasi Rp. 6.568.380,00 realisasi fisik 28,27 % (rendah), kebutuhan pencetakan dan penggandaan pada semester I yang masih relatif rendah, sebagian persediaan yang masih tersedia, serta pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan barang cetakan mengalami penyesuaian jadwal. Selain itu, pemanfaatan dokumen elektronik turut mengurangi kebutuhan pencetakan fisik. Percepatan realisasi dilakukan melalui pemutakhiran kebutuhan, penyusunan skala prioritas, percepatan pengadaan sesuai kebutuhan riil, serta monitoring realisasi secara berkala pada TW III dan TW IV Tahun 2026.

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 171.241.770,00 realisasi sebesar Rp. 105.660.880,00 realisasi fisik 61,7 % (tinggi) , hal ini disebabkan tingginya intensitas koordinasi dan konsultasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan telah direncanakan sejak awal tahun dan didukung dengan administrasi serta monitoring yang tertib. Selain itu, adanya berbagai agenda dan undangan

koordinasi dari perangkat daerah maupun instansi terkait turut mendorong tingginya realisasi kegiatan pada Triwulan I dan Triwulan II.

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 134.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.904.908,00 realisasi fisik 10,34 % (rendah) yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-00 realisasi sebesar Rp.1.200.000,00 realisasi fisik 60% (tinggi), karena telah dilaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa surat-menyurat, khususnya penyediaan meterai untuk mendukung tertib administrasi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 32.454.000,00 realisasi sebesar Rp. 12.704.908,00 realisasi fisik 39,14 % (rendah), pembayaran sesuai dengan rekening listrik, telepon dan wifi.

1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 0 realisasi fisik 0 % (rendah), karena kebutuhan jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan direncanakan direalisasikan pada periode berikutnya sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

1.5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 35.870.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.081.000,00 realisasi fisik 19,74 % (rendah) yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 19.460.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.581.000,00 realisasi fisik 18,40 % (rendah) karena pajak kendaraan bermotor belum waktunya perpanjangan STNK nya.

1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 7.140.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.500.000,00 realisasi fisik 49,02 % (rendah), karena pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya baru sebagian dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan masih terdapat kegiatan pemeliharaan yang akan direalisasikan pada periode berikutnya sesuai kebutuhan.

1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0 ,- realisasi fisik 0 % , karena perbaikan/pemeliharaan gedung belum dilaksanakan

1.5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 4.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %, karena belum waktunya untuk dilaksanakan pemeliharaan AC.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 23.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.200.000,00 realisasi fisik 79,13 % dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi), karena

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat telah dilaksanakan.

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi), karena Sosialisasi Prosedur Layanan Non Perizinan di Kecamatan telah dilaksanakan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.604.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.104.000,00 realisasi fisik 63,71 % (tinggi) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 19.104.000,00 realisasi sebesar Rp. 10.400.000,00 realisasi fisik 54,43 % (tinggi) yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.350.000,00 realisasi sebesar Rp. 100.000,00 realisasi fisik 7,4 % (rendah), musrenbangcam sudah dilaksanakan sebagai sarana untuk menyampaikan usulan masyarakat agar ada sinkronisasi antara program pemerintah dan yang diinginkan oleh masyarakat.

3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.434.000,00 realisasi Rp. 10.300.000,00 realisasi fisik 82.83 % (tinggi), Sosialisasi Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat

sudah dilaksanakan, Pekan Raya Kendal telah dilaksanakan.

3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.320.000,00 realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % (rendah), karena kegiatan belum dilaksanakan sampai dengan TW II tahun 2026.

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

3.2.1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi), Sosialisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat telah dilaksanakan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 66.300.480,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 31.620.122,00 realisasi fisik 47,69 % (tinggi) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

4.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 66.300.480,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 31.620.122,00 realisasi fisik 47,69 % (tinggi) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

4.1.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp. 66.300.480,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 31.620.122,00 realisasi fisik 47,69 % (tinggi) sub kegiatan ini adalah pembayaran honor Linmas sejumlah 2 orang dan sudah dibayarkan sampai dengan bulan pembayaran honor.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 19.400.000,00 realisasi fisik 84,34 % (tinggi) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.400.000,00 realisasi fisik 84,34 % (tinggi) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.300.000,00 realisasi fisik 89,47 % (tinggi) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan telah dilaksanakan.

5.1.2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.100.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) Sosialisasi Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku serta umat beragama telah dilaksanakan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 18.200.000 0,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

6.1. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 18.200.000 0,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) yang terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 18.200.000,00 realisasi fisik 79,13 % (tinggi) Sosialisasi Peran Masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Peningkatan Pajak Daerah telah dilaksanakan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut ini :

Adapun realisasi per sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1			2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	0 1			KECAMATAN								

7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50 %	50 %	100%	50 %	50 %
7	0 1	0 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	50 %	50 %	100%	50 %	50 %
7	0 1	0 1	2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1	50 %	2	1	50 %
7	0 1	0 1	2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4	1	25%	4	1	25%
7	0 1	0 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50 %	100%	50%	50 %
7	0 1	0 1	2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	36	29	80,55 %	36	29	80,55 %
7	0 1	0 1	2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	12	12	3	25%	12	3	25%

					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							
7	0 1	0 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
7	0 1	0 1	2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	0	0%	12	0	0%
7	0 1	0 1	2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	4	33,33%	12	4	33,33%
7	0 1	0 1	2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	0	0%	12	0	0%
7	0 1	0 1	2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	0	0%	12	0	0%
7	0 1	0 1	2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	5	41,66%	12	5	41,66%

7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8	66,66%	12	8	66,66%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6	50%	12	6	50%
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50%	12	6	50%
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	0%	12	0	0%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	19	19	10	52,63 %	19	10	52,63 %
7	01	01	2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	19	5	26,31%	19	5	26,31%

7	01	01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	13	6	46,15%	13	6	46,15%
7	01	01	2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	0	0%	3	0	0%
7	01	01	2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	11	0	0%	11	0	0%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100	100	90	90%	100	90	90%
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	9	75%	12	9	75%
7	01	02	2.02. 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan	12	12	9	75%	12	9	75%

					Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)							
7	0 1	0 2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Kegiatan)	12	12	9	75%	12	9	75%
7	0 1	0 2	2.04. 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	9	75%	12	9	75%
7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina (%)/ Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang (%)	71/30	71/30	71/73,33	100% / 244 %	71/30	71/73,33	100% / 244 %
7	0 1	0 3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)	7	7	1	14,28%	7	1	14,28%
7	0 1	0 3	2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	1	14,28%	7	1	14,28%

					(Lembaga)							
7	0 1	0 3	2.01. 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	2	0	0%	2	0	0%
7	0 1	0 3	2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	0	0%	12	0	0%
7	0 1	0 3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina (desa)	3	3	1	33,33%	3	1	33,33%
7	0 1	0 3	2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	3	1	33,33%	3	1	33,33%
7	0 1	0 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	50	50%	100	50	50%
7	0 1	0 4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang Dilaksanakan (kali)	13	12	6	50%	12	6	50%

7	01	04	2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	13	12	6	50%	12	6	50%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani (%)	100	100	60	60%	100	60	60%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kali)	1	1	1	100%	1	1	100%
7	01	05	2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52	75	75	100%	75	75	100%
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90	90	60	66,66%	90	60	66,66%

				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7	0 1	0 6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13	13	11	84,61%	13	11	84,61%
7	0 1	0 6	2.01. 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	13	11	84,61%	13	11	84,61%

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Singorojo

Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun 2026	Target Renja PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Triwulan II Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase Desa Mandiri di Kecamatan			0	0	0	0
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan (Nilai IKM)	-	-	96,41	96,41	95,73	96,42
3	Nilai SAKIP	-	-	73,25	73,25	73,35	73,35
4	Jumlah Desa yang naik statusnya	-	-	1	1	0	3

2.3 Analisis Keuangan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan tentang realisasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Tabel 2.3

Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu		Realisasi Sampai TW II 2025	Presentase Capaian
			RKPD 2026	APBD 2026		
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN		3.667.140.195	3.682.613.194	1.628.012.040	44,20 %
	KECAMATAN		3.667.140.195	3.682.613.194	1.628.012.040	44,20%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	3.424.218.995	3.516.708.714	1.521.091.918	43,25 %
1.1	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	4.000.000	475.000	55.000	11,57 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	350.000	35.000	10 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0

1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	125.000	20.000	16 %
1.1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.000.000	0	0	
1.2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase KetercapaianAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.557.595	3.108.760.194,00	1.363.276.912	43,85 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.116.020.195	3.108.635.194,00	1.363.251.912	43,85 %
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	11.537.400	125.000	25.000	20 %
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	0	0	0	0 %
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0 %
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	192.851.400	237.149.520	136.774.098	57,67 %
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.846.000	7.255.500	6.482.400	89,34 %
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25.250.000	25.141.250	16.601.438	66,03 %
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11.120.000	4.043.000	1.461.000	36,13 %
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.000.000	23.235.000	6.568.380	28,26 %
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	131.168.400	171.241.770	105.660.880	61,70 %

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1.4.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.017.000	6.233.000	0	0 %
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0 %
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0 %
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel Disediakan	0	0	0	0 %
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0 %
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40.000.000	134.454.000	13.904.908	10,34 %
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	60 %
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38.000.000	32.454.000	12.704.908	39,14 %
1.5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0 %
1.5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	100.000.000	0	0 %
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	59.810.000	35.870.000	7.081.000	19,74 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.280.000	19.460.000	3.581.000	18,40 %

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.820.000	7.140.000	3.500.000	49,01 %
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000	5.000.000	0	0 %
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000	4.270.000	0	0 %
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	37.220.000	23.000.000	18.200.000	79,13
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	4.100.000	0	0	0 %
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.100.000	0	0	0 %
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0 %
2.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	16.500.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
2.3	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0	0 %
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang/ Presentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	62.424.000	30.604.000	19.500.000	63,71 %
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	45.864.000	19.104.000	10.400.000	54,43 %
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.300.000	1.350.000	100.000	7,40 %
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27.194.000	12.434.000	10.300.000	82,83 %
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.370.000	5.320.000	0	0 %

3.2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0 %
3.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	68.687.200	66.300.480	31.620.122	47,69 %
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.180.000	0	0	0 %
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.180.000	0	0	0 %
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0 %
4.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	64.507.200	66.300.480	31.620.122	47,69 %
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	64.507.200	66.300.480	31.620.122	47,69 %

		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Presentase potensi kasus konflik sosial yang di tangani	37.300.000	23.000.000	19.400.000	84,34 %
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	30.000.000	23.000.000	19.400.000	84,34 %
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.560.000	11.500.000	10.300.000	89,56 %
5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.180.000	0	0	0 %
5.1.3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.560.000	11.500.000	9.100.000	79,13 %

5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0 %
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik	37.290.000	23.000.000	18.200.000	79,13 %
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	37.290.000	23.000.000	18.200.000	79,13 %
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0 %
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	37.290.000	23.000.000	18.200.000	79,13 %
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.600.000	0	0	0 %
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0 %

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 tidak memasukkan usulan dari masyarakat, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I L	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Singorojo Kabuaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target	
				2026	Perubahan 2026
1	Presentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0	0	0
2	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Nilai	90,56	96,41	96,41
3	Nilai SAKIP	Nilai	73,25	73,25	73,25
4	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Desa	3	1	3

3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya disertai dengan Lampiran Rancangan Perubahan RKPD 2026.

Penambahan dan pengurangan anggaran perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu penambahan dan pengurangan dana. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan disebabkan ada 3 (tiga jabatan struktural yang kosong sehingga kebutuhan gaji sudah bisa terpenuhi berdasarkan realisasi sampai

dengan bulan Juni dan perkiraan sampai dengan bulan Desember 2026. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 1(satu) Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan yaitu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan karena sampai dengan semester I kebutuhan fotocopy dan MMT sudah bisa terspenuhi dan anggaran yang tersedia masih lebih dari 71 % sehingga dialihkan untuk kebutuhan lain, sementara Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami penambahan, hal ini karena adanya penambahan kegiatan dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan aktivitas Bintek Pengadaan Barang dan Jasa untuk transport peserta bintek dari desa.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 1 (satu) Sub kegiatan yang mengalami penambahan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, untuk pengadaan APPAR sebagai sarana proteksi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan perkantoran khususnya di Kecamatan Singorojo, dalam rangka melindungi keselamatan pegawai dan masyarakat, mengamankan aset serta dokumen pemerintah. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang mengalami penambahan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan untuk pembayaran rekening telepon masih ada kekurangan, anggaran yang ada hanya bisa digunakan untuk pembayaran rekening telepon sampai dengan bulan Juli 2026. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang mengalami penambahan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu untuk pemeliharaan sepeda motor dinas roda dua karena meningkatnya intensitas penggunaan kendaraan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, monitoring, pembinaan dan koordinasi ke

desa-desa juga kondisi kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan penggantian suku cadang secara berkala, sementara biaya jasa servis dan suku cadang mengalami peningkatan . Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perangkat komputer yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data, dan pelaporan. Penambahan anggaran juga diperlukan untuk mengantisipasi kerusakan perangkat, penggantian komponen, serta menjaga agar perangkat komputer tetap berfungsi optimal sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan Kecamatan Singorojo. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung akibat usia bangunan, intensitas penggunaan, kondisi cuaca, serta adanya kerusakan pada beberapa bagian bangunan, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan publik.

Program yang mengalami pengurangan hampir semua nya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami perubahan dengan adanya pengurangan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan di Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdapat pengurangan di 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah

Kerja Kecamatan, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terjadi pengurangan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Program Ketentraman dan Ketertiban terjadi perubahan berupa penambahan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami pengurangan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat pengurangan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa hal ini karena honor narasumber yang dianggarkan untuk Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan namun yang hadir Pejabat Eselon II / yang disetarakan sehingga ada anggaran yang tidak terealisasikan dan dipergunakan untuk kegiatan lain di anggranan perubahan.

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Dearah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

4. Program Koordinasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SINGOROJO KAB. KENDAL

TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SINGOROJO							3.667.140.195,00	3.682.613.194,00	3.490.700.755,00	-176.439.440,00							4.851.556.326,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.667.140.195,00	3.682.613.194,00	3.490.700.755,00	-176.439.440,00							4.851.556.326,00	
7.01	KECAMATAN							3.667.140.195,00	3.682.613.194,00	3.490.700.755,00	-176.439.440,00							4.851.556.326,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				-	100.00 %	3.424.218.995,00	3.516.708.714,00	3.346.556.275,00	-77.662.720,00					ASN atau Masyarakat Kab. Kendal ASN dan Masyarakat Kab. Kendal ASN Kab.		4.435.556.326,00	

																Kendal			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD				-	100 Persen	4.000.000,00	475.000,00	475.000,00	-3.525.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	350.000,00	350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			2.500.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	125.000,00	125.000,00	-1.875.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			2.500.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	3.127.557.595,00	3.108.760.194,00	2.916.847.755,00	-210.709.840,00							3.952.556.326,00	

7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan	3.116.020.195,00	3.108.635.194,00	2.916.722.755,00	-199.297.440,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			3.937.556.326,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	11.537.400,00	125.000,00	125.000,00	-11.412.400,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguat	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan			15.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														an peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	teknologi				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor				-	100 Persen	192.851.400,00	237.149.520,00	235.469.520,00	42.618.120,00							326.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.846.000,00	7.255.500,00	7.255.500,00	1.409.500,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			6.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	22.250.000,00	25.141.250,00	25.141.250,00	2.891.250,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			28.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.017.000,00	6.233.000,00	6.233.000,00	1.216.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan			7.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														mengembangkan agroma ritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	teknologi				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.120.000,00	4.043.000,00	4.673.900,00	-6.446.100,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroma ritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			7.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	17.000.000,00	23.235.000,00	15.542.100,00	-1.457.900,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			18.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	131.618.400,00	171.241.770,00	176.623.770,00	45.005.370,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan			260.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														menge mbangk an agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	teknol ogi				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah				-	5 Unit	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00							1.000.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	3 Unit	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			1.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor				-	12 Bulan	40.000.000,00	134.454.000,00	135.704.000,00	95.704.000,00							52.000.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			5.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	32.454.000,00	33.704.000,00	-4.296.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirau	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelaya			42.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														sahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	nan publik serta peningkatan riset dan teknologi				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			5.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	19 Unit	59.810.000,00	35.870.000,00	50.060.000,00	-9.750.000,00							99.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				19 Unit	19 Unit	30.280.000,00	19.460.000,00	21.460.000,00	-8.820.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			45.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				14 Unit	13 Unit	12.820.000,00	7.140.000,00	9.330.000,00	-3.490.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			20.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan			24.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														menge mbangk an agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	teknol ogi				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				11 Unit	11 Unit	6.710.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	-2.440.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase**				**-**	**100 %**	**37.220.000,00**	**23.000.000,00**	**18.200.000,00**	**-19.020.000,00**					**ASN atau Masyarakat Kab.**		**44.000.000,00**	

		pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan														**Kendal**			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				-	12 Kali	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00							20.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			20.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang				-	1 Kegiatan	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00							10.000.000,00	

	Daerah yang Ada di Kecamatan	Ada di Kecamatan																	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			10.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				-	1 Kegiatan	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00							14.000.000,00	

7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			14.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD**				**-**	**30 Persen**	**62.424.000,00**	**30.604.000,00**	**20.434.000,00**	**-41.990.000,00**					**Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa Kab. Kendal**		**155.000.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa				-	13 Desa	45.864.000,00	19.104.000,00	11.334.000,00	-34.530.000,00							130.000.000,00	

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00	1.350.000,00	100.000,00	-7.200.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			15.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	27.194.000,00	12.434.000,00	11.234.000,00	-15.960.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			45.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														menge mbangk an agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.					
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	11.370.000,00	5.320.000,00	0,00	-11.370.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroma ritim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			70.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina				-	13 Desa	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00							25.000.000,00	

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*				1 Laporan	1 Laporan	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			25.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani**				**-**	**100 %**	**68.687.200,00**	**66.300.480,00**	**66.610.480,00**	**-2.076.720,00**					**ASN, Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa Kab. Kendal**	**Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa Kab. Kendal**	**82.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				-	12 Kali	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00							7.000.000,00	

	Ketertiban Umum																		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			7.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				-	12 Kali	64.507.200,00	66.300.480,00	66.610.480,00	2.103.280,00							75.000.000,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				12 Laporan	12 Laporan	64.507.200,00	66.300.480,00	66.610.480,00	2.103.280,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguat	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan			75.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

														an peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	teknologi				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani**				**-**	**100 %**	**37.300.000,00**	**23.000.000,00**	**19.400.000,00**	**-17.900.000,00**					**Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa Kab. Kendal**		**85.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan				-	3 Kegiatan	37.300.000,00	23.000.000,00	19.400.000,00	-17.900.000,00							85.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan*				70 Orang	70 Orang	16.560.000,00	11.500.000,00	10.300.000,00	-6.260.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			30.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO

	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*																	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*				156 Orang	156 Orang	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			38.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				75 Orang	75 Orang	16.560.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	-7.460.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi			17.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyusunan APBDes tepat waktu**				**-**	**90 %**	**37.290.000,00**	**23.000.000,00**	**19.500.000,00**	**-17.790.000,00**					**Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat**		**50.000.000,00**	

																Desa Kab. Kendal			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes				-	100 Persen	37.290.000,00	23.000.000,00	19.500.000,00	-17.790.000,00							50.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	37.290.000,00	23.000.000,00	19.500.000,00	-17.790.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa			50.000.000,00	KECAMATAN SINGOROJO
JUMLAH								**3.667.140.195,00**	**3.682.613.194,00**	**3.490.700.755,00**	**-176.439.440,00**							**4.851.556.326,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2026 perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian target kinerja, serta realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan yang masih memiliki tingkat realisasi rendah perlu dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketepatan sasaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan dan penumpukan penyerapan anggaran pada semester II. Selain itu, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan perlu dilaksanakan secara tepat waktu agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pada tahun berjalan serta sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2026. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk memastikan koordinasi, keterpaduan, dan keberlanjutan program dan kegiatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Singorojo melaksanakan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pegawai dan pejabat di Kecamatan Singorojo melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan Renja Tahun 2026 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjabaran lebih lanjut Perubahan Renja Tahun 2026 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat bersama pejabat di Kecamatan Singorojo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja, Camat melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, serta capaian kinerja masing-masing seksi dan subbagian secara berkala.
5. Perubahan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan penganggaran selama Tahun Anggaran 2026.
6. Setiap seksi dan subbagian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bahan perbaikan serta penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 diarahkan pada “Kendal Hebat”, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar semakin efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kecamatan Singorojo sebagai perangkat daerah kewilayahan perlu melakukan tindak lanjut melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan di wilayah kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan tindak lanjut diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Kendal melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan kapasitas aparatur dan pemerintahan desa, serta peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Kecamatan Singorojo meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pendampingan pemerintah desa, serta koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dan data juga terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian IKU Kecamatan Singorojo.

Kecamatan Singorojo menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, melalui peningkatan kualitas penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa, melalui pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan, administrasi, dan pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Peningkatan intensitas koordinasi, melalui koordinasi dengan perangkat daerah, dinas/instansi, UPTD/UPTB, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, melalui fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan pemerintah desa, antara lain dalam penyusunan APBDes, administrasi pemerintahan desa, serta pemantauan aset daerah dan aset desa.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi dan responsivitas aparatur, serta pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.
6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, melalui fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan kecamatan dan desa dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal serta peningkatan kualitas usulan pembangunan.
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah desa.

8. Peningkatan monitoring dan evaluasi, melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta capaian pembangunan sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut.

Kendal, 08 September 2026
CAMAT SINGOROJO



CANDRA PUTRA, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004